

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice system)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1994/1995, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Putusan Pengadilan Militer dalam Perkara Koneksitas*, BPHN, Jakarta
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Falaakh, Muhammad Fajrul, dkk, 2001, *Implikasi Reposisi TNI-POLRI Di Bidang Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Hadjon, Philipus M., 1985, *Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan*, Djumali, Surabaya
- Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartono, C.F.G Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung



- Heniarti, Dini Dewi, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum dan Pembaruan Hukum Nasional*, Refika Aditama, Bandung
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- HS, Salim dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Imparsial, 2007, *Reformasi Peradilan Militer Di Indonesia*, Imparsial, Jakarta
- Kartanegara, Satochid dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta
- Rukmini, Mien, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung
- Salam, Moch. Faisal, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Setiadi, H. Edi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Sianturi, S.R., 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni, Jakarta



Soegiri, 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia*, CV. Indra Djaja, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Sumaryanti, 1987, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*, Bina Aksara, Jakarta

Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Wisnubroto, Al. dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Yuwono, Soesilo, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Alumni, Bandung

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2008

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2015

## **B. Artikel Jurnal**

Edy, Slamet Sarwo, "Quo Vadis Peradilan Militer Indonesia", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXXII Nomor 376 Maret 2017

Gani, Ruslan Abdul, "Koneksitas Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Militer", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2012

Hariri, Ahmad, "Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2014

Mawarni, Yusnita, "Penetapan Tersangka Pada Peradilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Lentera Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Juli 2018



- Moeliono, Tristam P. dan Widati Wulandari, “Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap Putusan MK tentang Praperadilan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 4 Volume 22, Oktober 2015
- Muchsin, “Eksistensi Dan Kedudukan Peradilan Militer Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXVI Nomor 300, November 2010
- Rachman, Taufik, “Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana”, *Yuridika*, Volume 25, Nomor 1, Januari-April 2010
- Setyo, Eliyas Eko, “Efektivitas Peradilan Koneksitas dalam Menyelesaikan Kasus Korupsi Di Tubuh Militer”, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXXIII Nomor 385 Desember 2017
- Soebagijo, Hari, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemeriksaan Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Umum”, *Jurnal Law Reform*, Volume 6 Nomor 1, April 2011
- Supriyatna, S., “Memahami Urgensi Peradilan Militer Dari Sudut Kepentingan Pertahanan Dan Keamanan Negara”, *Jurnal Yuridis*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2014

### **C. Karya Ilmiah**

- Edy, Slamet Sarwo, 2016, “Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Supriyadi, 2015, “Reformulasi Kewenangan Mengadili Tindak Pidana Umum Oleh Militer Di Indonesia”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Hakim, Zulkarnain Baso, 2014, “Politik Penegakan Hukum Pidana Di Dalam Peradilan Militer”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Yusuf, Dita Iriana, 2017, “Perbandingan Sistem Pembinaan Narapidana Militer Dan Narapidana Sipil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung
- Utami, Niken Subekti Budi dan Supriyadi, 2013, “Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana”,



*Laporan Hasil Penelitian*, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Sagala, Parluhutan, 2018, “Tinjauan Putusan Terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas”, *Makalah*, Pengadilan Militer Utama, Jakarta

Sagala, Parluhutan dan Fredy Ferdian, 2016, “Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”, *Makalah yang disampaikan dalam rangka Workshop Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, United States Defense Institute of International Legal Studies (US DIILS)*, Jakarta

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24)

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1493)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



1964 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4257)

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Wewenang Pengadilan Negeri Untuk Melaksanakan Sidang Pra Peradilan Terhadap Seorang Yang Berstatus Militer

Keputusan Bersama antara Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Darat, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung RI Nomor Kep/B/61/XII/1971 tentang Kebijakan dalam Pemeriksaan yang Dilakukan Bersama-sama oleh Orang yang Termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer/Angkatan Bersenjata dan Orang yang Termasuk dalam Yurisdiksi di Lingkungan Peradilan Umum.

Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman Kep.10/M/XII/1983 dan Kep.57.PR.09.03 Tahun 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Tindak Pidana Koneksitas.

Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor Skep. 808/IX/1988 tentang Pelaksanaan Tempat Kedudukan dan Pembinaan Sekretariat Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas

Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor 809/IX/1988 tentang Pengendalian dan Pengawasan atas Kegiatan Tim Tetap untuk Penyidikan Tindak Pidana Koneksitas.

Surat Edaran Oditur Jenderal ABRI Nomor SE/B/95/VII/1991 tentang Penunjuk Sementara Pelaksanaan Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.  
Petunjuk Pelaksana Oditur Jenderal ABRI Nomor Juklak/01/IV/1993 tentang Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas



### **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Smn Tahun 2015 tertanggal 12 Maret 2015

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 05-K/PM II-11/AU/I/2016 Tahun 2016 tertanggal 26 Mei 2016

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 122/Pid.B/2016/PN Kln Tahun 2016, tertanggal 26 September 2016

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 59-K/PM II-11/AU/IX/2016 Tahun 2016, tertanggal 9 Januari 2017

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 521/Pid.Sus/2015/PN.Smn Tahun 2015, tertanggal 24 Maret 2016

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 522/Pid.Sus/2015/PN.Smn Tahun 2015, tertanggal 24 Maret 2016

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 21-K/PM II-11/AD/IV/2016 Tahun 2016, tertanggal 22 Juni 2016

### **F. Internet**

Burhan Dahlan, “Hal-Hal Yang Perlu Pengaturan Dalam RUU Peradilan Militer”, dalam [www.dilmil-madiun.go.id](http://www.dilmil-madiun.go.id) diakses pada tanggal 19 Juni 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Arti kata Pemeriksaan Terpisah”, dalam [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses pada tanggal 1 Februari 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Arti Kata Alat Negara”, dalam [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses pada tanggal 4 Mei 2019

“Polisi Paling Sering Melanggar Prinsip *Fair Trial*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d191d57d5749/polisi-paling-sering-melanggar-prinsip-fair-trial> diakses tanggal 19 Maret 2019

“Penyatuan Atap Kekuasaan Kehakiman Tuntas Sebagian”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10029/penyatuan-atap-kekuasaan-kehakiman-tuntas-sebagian> diakses pada tanggal 4 Maret 2019

“Peralihan Peradilan Militer Ke MA Menutup Rangkaian Penyatuan Atap”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11066/peralihan-peradilan-militer-ke-ma-menutup-rangkaian-penyatuan-atap> diakses pada tanggal 4 Maret 2019